

LKjIP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jl. KHA. Dahlan Nomor 01 Lamongan Kode Pos 62214

Telp. (0322) 321414 Fax : 322603

Web Site : www.lamongankab.go.id/bapenda

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dapat tersusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan atas penggunaan anggaran.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini menggambarkan sejumlah capaian kinerja terhadap target tahun 2022 beserta analisisnya, serta rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk perbaikan kinerja kedepan.

Akhir kata, kami berharap dengan disusunnya Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik bagi perbaikan dan peningkatan kinerja bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Lamongan, 13 Januari 2022

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN



A. FARIKH SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 00

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	6
C. Data Umum Organisasi.....	10
D. Sistematika Pelaporan	18
Bab II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
1. Visi	21
2. Misi	21
3. Tujuan	22
4. Sasaran	22
5. Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
B. Rencana Kerja	23
C. Perjanjian Kinerja	27
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	32
A. Capaian Kinerja Organisasi	32
1. Pencapaian Kinerja	32
2. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya	41
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d. Akhir Periode RPJMD/Renstra	42
4. Analisis Penyebab Keberhasilan yang Telah Dilakukan	43
5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	43
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Pencapaian Kinerja	45

B. Realisasi Anggaran	48
Bab IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	11
Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	12
Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	13
Tabel 1.4 Sarana dan Prasarana	14
Tabel 1.5 Anggaran	17
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)	23
Tabel 2.2 Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja	24
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Eselon II	27
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Eselon III	28
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Eselon IV	29
Tabel 3.1 Capaian Kinerja	33
Tabel 3.2 Persentase Peningkatan PAD Tahun 2022	34
Tabel 3.3 Realisasi Pajak Daerah Tahun 2022.....	35
Tabel 3.4 Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022	36
Tabel 3.5 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan Tahun 2022	38
Tabel 3.6 Lain-Lain PAD yang Sah	40
Tabel 3.7 Nilai Sakip Bapenda Tahun 2022	41
Tabel 3.8 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya	41
Tabel 3.9 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD/Renstra	42
Tabel 3.10 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2022	44
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Program	45
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Kegiatan	46

Tabel 3.13	Capaian Kinerja Sub Kegiatan	47
Tabel 3.14	Realisasi Anggaran	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1. Struktur Organisasi	9
Gambar 1.2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang	11
Gambar 1.3. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan ..	12
Gambar 1.4. Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	13

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), serta dalam rangka menuju Reformasi Birokrasi sebagai salah satu tuntutan masyarakat, setiap instansi pemerintah dituntut untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara demi terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Atas dasar tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan yang salah satunya diwujudkan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2022 yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan berkedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah di bidang keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Badan, serta berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian tugas Penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan berkewajiban untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang dilengkapi dengan perjanjian kinerja sesuai dengan Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Review atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk melakukan penetapan dan pengukuran kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan diatas, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai instansi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) kepada Bupati. Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 dimaksudkan sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022, khususnya berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan ini, diharapkan dapat:

1. Mendorong Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan baik dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah;
2. Terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, jelas, mudah dan transparan;

3. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat Kabupaten Lamongan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022, antara lain:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2001 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);

14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan sebagaimana telah dirubah yang kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);
20. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022;
23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022.
24. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Lamongan telah membentuk Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 84 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan kami mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
2. Perencanaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
3. Pembinaan teknis program kerja di bidang pendapatan daerah;
4. Pengendalian Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pendapatan Daerah;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan daerah; dan
6. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

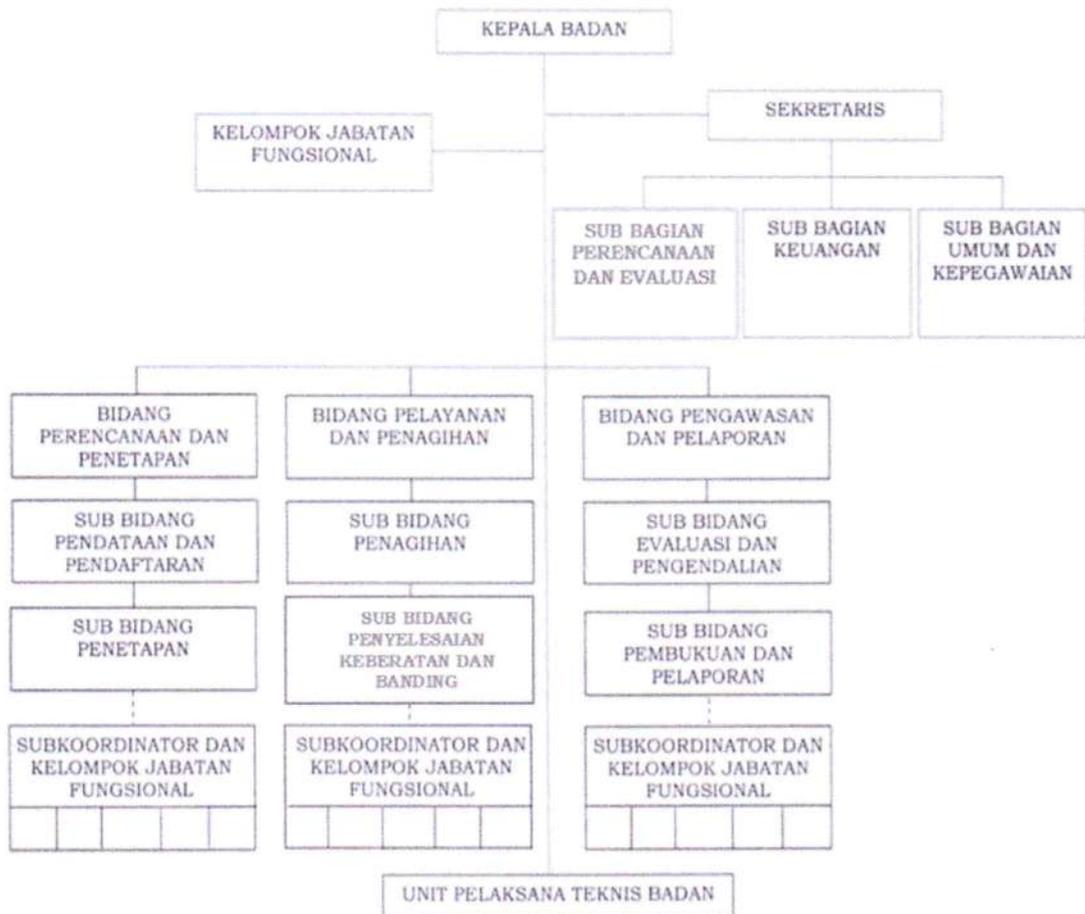
Dalam melaksanakan Tugas pokok dan Fungsinya, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat;
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perencanaan dan Penetapan;
 - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran;

- b. Seksi Penetapan;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pelayanan dan Penagihan;
- a. Seksi Penagihan;
 - b. Seksi Penyelesaian Keberatan dan Banding;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pengawasan dan Pelaporan;
- a. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;
 - b. Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
 - c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Unit Pelaksana Teknis Badan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dapat dilihat dalam gambar berikut :

Gambar 1. 1
Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan



Adapun penjabaran tugas Sekretariat dan masing-masing Bidang berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagai berikut:

1. Sekretariat

Memiliki tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.

2. Bidang Perencanaan dan Penetapan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Perencanaan dan Penetapan.

3. Bidang Pelayanan dan Penagihan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Pelayanan dan Penagihan.

4. Bidang Pengawasan dan Pelaporan

Memiliki tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan Bidang Pengawasan dan Pelaporan.

C. Data Umum Organisasi

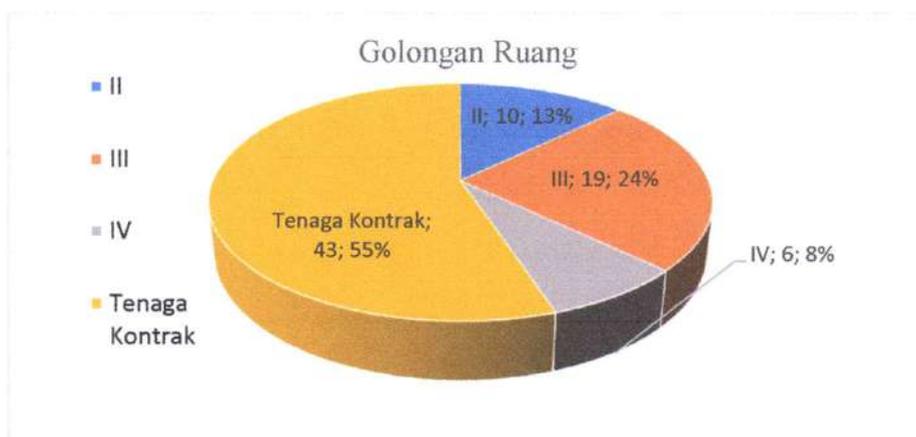
1. Personil

Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan per 31 Desember 2022 sebanyak 78 orang, dengan perincian kondisi riil pegawai berdasarkan golongan, tingkat pendidikan dan jenis kelamin adalah sebagaimana tabel dibawah :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2022

No	Golongan Ruang	Jumlah
1	I	-
2	II	10
3	III	19
4	IV	6
5	Tenaga Kontrak	43
Total		78

Gambar 1.2
Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang
Tahun 2022

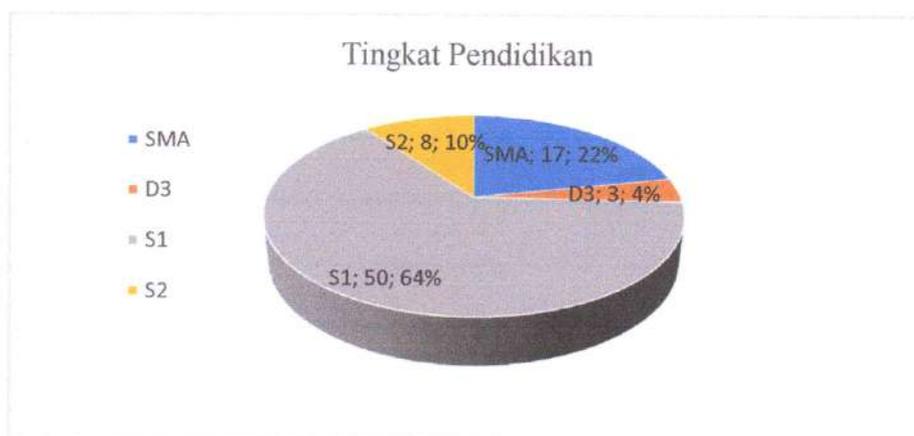


Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas jumlah pegawai berdasarkan golongan ruang terbesar adalah golongan III berjumlah 19 orang (24%) selanjutnya golongan IV berjumlah 6 orang (8%), golongan II berjumlah 10 orang (13%), adapun untuk tenaga kontrak berjumlah 43 orang (55%).

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	SMA	17
2	D3	3
3	S1	50
4	S2	8
Total		78

Gambar 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tahun 2022



Jika dilihat dari tingkat Pendidikan, persentase terbesar adalah pegawai dengan tingkat S1 berjumlah 50 orang atau 64%, selanjutnya tingkat S2 berjumlah 8 orang (10%), SMA berjumlah 17 orang atau (22%) dan terakhir D3 berjumlah 3 orang (4%).

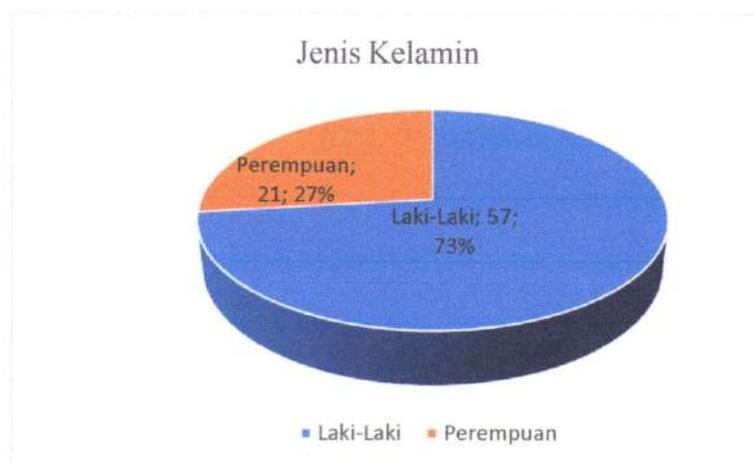
Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun 2022

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	57
2	Perempuan	21
Total		78

Gambar 1.4

Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Tahun 2022



Jika dilihat dari tabel dan grafik di atas jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin dengan persentase terbesar adalah pegawai laki-laki berjumlah 57 orang atau 73%, sedangkan pegawai perempuan berjumlah 21 orang atau 27%.

2. Sarana dan Prasarana

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan pada Tahun 2022 memiliki Sarana dan Prasarana penunjang dan merupakan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2022

No	Nama	Jumlah (Unit)
1	Station Wagon	5
2	Sepeda Motor	51
3	Rol Meter	6
4	Digital Multimeter	2
5	Meteran	1
6	GPS	2
7	Lasser Distance Meter	1
8	Theodolite	2
9	Mesin Hitung Manual	1
10	Lemari Besi/Kayu	9
11	Raak Besi/Metal	2
12	Rak Kayu	1
13	Filling Besi/Metal	1
14	Filling Kayu	2
15	Band Kas	1
16	Kardek Besi/Metal	1
17	Kardek Kayu	1
18	Rotary Filling	1
19	Peti Uang	1
20	Lemari Sorok	1
21	Lemari Kaca	1
22	Lemari Makan	1
23	Lemari Besi/Metal	1
24	Perlengkapan Reklame	1
25	Papan Visual	1
26	Alat Penghancur Kertas	2
27	Papan Nama Instansi	3
28	Papan Pengumuman	1
29	Porforator Besar	2

30	White Board Elektronik	1
31	Laser Lecia Disto	1
32	Rak Kayu	1
33	Meja Besi/Metal	8
34	Meja Panjang	1
35	Meja Bundar	1
36	Bangku Tunggu	4
37	Sofa	3
38	Rak Besi/Metal	2
39	Meja Pelayanan	1
40	Almari Sudut	2
41	AC	20
42	Televisi	1
43	Mainframe	4
44	Gigabit Router	1
45	Kabell UTP Cat	2
46	Switch Hub 24 Port Unnanage	4
47	RAM Server	2
48	PC	47
49	Laptop	4
50	Note Book	20
51	Printer	40
52	Scanner	3
53	UPS	4
54	Hardisk Server	2
55	Kabel HDMI	2
56	UPS Server	2
57	SSD Server	2
58	Server	1
59	Router	1
60	Switch HUB	1
61	Solid State Disk	5
62	Meja Kursi Pejabat Eselon II	1
63	Meja Kursi Pejabat Eselon III	4
64	Meja Kursi Pejabat Eselon IV	17

65	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	27
66	Meja Rapat Eselon I	1
67	Meja Rapat Eselon II	6
68	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2
69	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	14
71	Kursi Rapat Ruang Rapat Pejabat Eselon	14
72	Kursi Rapat	18
73	Kursi Rapat Lipat Model A	7
74	Kursi Tamu di Ruang Pejabat Eselon II	1
75	Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon I	1
76	Kursi Lipat	1
77	Camera + Attachment	7
78	Proyektor + Attachment	2
79	Telephone Hybrid	2
80	Profesional Sound System	1
81	Handycam	2
82	Kamera Drone	1
83	LED Televisi	3
84	Tripod Camera	2
85	Mixer PVC	1
86	Faximile	1
	Total	438

Sumber: Kartu Inventaris Bapenda, 2022

3. Pembiayaan

Pada tahun 2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan mendapat pagu anggaran sebesar Rp. 19.202.122.348,00. Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan 2 program dan 8 kegiatan dan 35 sub kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.5
 Anggaran Badan Pendapatan Daerah
 Kabupaten Lamongan Tahun 2022

A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	13.003.974.348,00
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.819.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.819.000,00
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.282.251.948,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.222.251.948,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00
III	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.820.000.000
5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00
6	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.820.000,00
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.716.700,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	216.700,00
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.500.000,00
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.449.300,00
1	Pengadaan Mebel	7.178.300,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.271.000,00
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.148.400,00
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.286.400,00
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.994.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.868.000,00

VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.769.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.069.000,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.400.000,00
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000,00
B	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.198.148.000,00
I	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	6.198.148.000,00
1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	16.000.000,00
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	25.000.000,00
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.022.000,00
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	70.000.000,00
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.375.000.000,00
6	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	540.000.000,00
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	152.022.000,00
8	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	53.644.000,00
9	Penagihan Pajak Daerah	3.481.400.000,00
10	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.000.000,00
11	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	127.060.000,00
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	266.000.000,00
	Total Anggaran	19.202.122.348,00

D. Sistematika Pelaporan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi. Pada bab ini disajikan pula data umum organisasi yang meliputi personil, sarana dan prasarana serta pembiayaan.

2. Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis yang meliputi tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Pada bab ini disajikan pula rencana kinerja yang meliputi program dan kegiatan tahun 2022, serta disajikan pula perjanjian kinerja tahun 2022 mulai pejabat tertinggi sampai staf.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja organisasi tahun 2022, perbandingan realisasi kinerja sampai dengan akhir RPJMD dan dengan realisasi nasional. Disajikan pula analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan dan analisis efisiensi atas penggunaan sumberdaya serta realisasi anggaran tahun 2022.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan mengenai perencanaan dan akuntabilitas kinerja organisasi tahun 2022. Dalam bab ini disajikan pula permasalahan dan solusi yang ditempuh beserta saran untuk perbaikan perencanaan dan akuntabilitas kinerja ke depan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 memiliki tujuan adalah:

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan, serta Prioritas Pembangunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026;
2. Menetapkan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dan Perencanaan Anggaran berjalan;
3. Mewujudkan sinergitas dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah terpadu antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Rencana Strategis yang disusun oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026, memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang merupakan panduan/acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

1. Visi

Visi adalah cara pandang jauh kedepan, kemana dan bagaimana organisasi harus dibawa dan berkarya agar konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka Visi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan adalah :

”Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan”

Visi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan visi dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

2. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Dengan kata lain Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah agar tujuan organisasi sesuai visi yang telah ditetapkan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Instansi Pemerintah, mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di masa mendatang.

Selanjutnya dalam rangka mencapai visinya tersebut, dirumuskan misi sebagai berikut:

“Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, serta Memberikan Pelayanan Publik yang Berkualitas Sebagai Upaya Optimalisasi Reformasi Birokrasi”

Misi sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan misi ke 5 (lima) dari Pemerintah Kabupaten Lamongan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026.

3. Tujuan

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan, perlu ditetapkan tujuan (*goal*) yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sementara itu, Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan (*goal*) serta dapat memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran misi dan tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

”Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pendapatan Daerah”

4. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka pendek (1 tahun). Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan. Disamping itu, sasaran juga merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategik Pemerintah.

Sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan selama sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai adalah :

“Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah”

5. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun sebagai berikut

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULA	TARGET
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Realisasi PAD Tahun ini - $\frac{\text{Realisasi PAD Tahun Sebelumnya}}{\text{Realisasi PAD Tahun Sebelumnya}} \times 100$	2,56 %
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	Penilaian dari Inspektot	87,51

B. Rencana Kinerja Tahun 2022

Proses penyusunan Rencana Kinerja (Renja) tahun 2022 dimulai sejak tahun 2021 yang mendasarkan pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Rencana Kinerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 secara garis besar sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2022

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Unit Internal yang Terlayani dengan Baik	IKM internal Bapenda
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi PD Yang Tersusun
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Tersusun
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Kinerja Tepat Waktu	Jumlah Dokumen Evaluasi PD yang Tersusun
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Keuangan yang Tersusun
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan Pegawai	Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Tersusun
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran yang Tersusun
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Administrasi Kepegawaian	Persentase Administrasi Kepegawaian yang Terpenuhi
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum yang Terpenuhi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pengadaan Peralatan Rumah Tangga
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Pengadaan ATK

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersediannya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Pengadaan Barang Cetak dan Penggandaan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediannya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Persentase Terlaksananya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersediannya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah
Pengadaan Mebel	Tersediannya Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersediannya Peralatan Kantor	Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersediannya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terbayarkan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang Terbayarkan
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersediannya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan yang Tersedia
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer/Tenaga Pengamanan/Sopir yang Menerima Gaji/Honor
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Baik	Jumlah Barang Milik Daerah yang Terpelihara
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan Baik	Jumlah STNK yang Terlunasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersediannya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya Peralatan dan Mesin Lainnya dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan Baik	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Jumlah Wajib Pajak	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak
	Meningkatnya Pajak Daerah	Persentase Peningkatan Pajak Daerah
	Meningkatnya Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya
Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Penilaian Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun
	Tersedianya Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia
	Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pengendalian Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pajak Daerah yang Tersusun
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Tersusunnya Dokumen Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Dokumen Analisa Potensi dan Kebijakan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Terselenggaranya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Tersusunnya Database Obyek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak yang Telah Didata dan Dimutakhirkan
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Tersusunnya Dokumen Penilaian PBB-P2 dan BPHTB	Jumlah Obyek Pajak yang Telah Dilakukan Penilaian Baik Massal Maupun Individual
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Terselenggaranya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pelayanan yang Tersedia
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Tersusunnya Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Realisasi Pajak Daerah yang Tersusun
Penagihan Pajak Daerah	Tersusunnya laporan penagihan pajak daerah	Jumlah Laporan Hasil Penagihan Pajak Daerah yang Tersusun
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Terselesaikannya Permohonan Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Berkas Keberatan Pajak Daerah yang Terselesaikan
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Tersusunnya Laporan Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Pajak Daerah yang Tersusun
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Tersusunnya Laporan Pembinaan dan Pengawasan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengawasan Retribusi Daerah yang Tersusun

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian kinerja tahun 2022 telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Kinerja inilah yang selanjutnya dijabarkan (*cascading*) menjadi kinerja seluruh unit dan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kinerja pada level Kepala Badan (Eselon 2) berisi Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencakup sasaran, indikator kinerja, dan target sebagai berikut :

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Prosentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,56 %
		Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,51%
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,26%
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	1,86%
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	87,51
		Nilai IKM Internal Bapenda	83,24

Penandatanganan perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dilakukan pada bulan Januari 2022, yang isinya merupakan penjabaran dari

IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Adapun Perjanjian Kinerja untuk eselon III sampai dengan eselon IV sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Eselon III
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2022

No.	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi PD yang tersusun	6 dokumen	Sekretaris
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	4 laporan	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase administrasi kepegawaian yang terpenuhi	100%	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi umum yang terpenuhi	100%	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah	5 jenis	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terbayarkan	100%	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang terpelihara	77 unit	
8	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Penilaian yang Tersusun	4 dokumen	Kabid Perencanaan dan Penetapan
		Jumlah Jenis Pelayanan dan Sarana Prasarana Pajak Daerah yang Tersedia	15 jenis	Kabid Pelayanan dan Penagihan
		Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian yang Tersusun	8 laporan	Kabid Pengawasan dan Pelaporan

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2022

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	2	3	4	5
I Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1	Penyuluhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	2 dokumen	Kasubag Perencanaan dan Evaluasi
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi PD yang tersusun	4 dokumen	
II Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	43 orang	Kasubag Keuangan
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun yang tersusun	3 Laporan	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran	12 Laporan	
III Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya	100 Pcs	Kasubag Umum dan Kepegawaian
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	56 Peserta	
IV Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16 jenis	
2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pengadaan peralatan rumah tangga	2 jenis	
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengadaan ATK	35 jenis	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	10 cetakan, 18 jenis	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 surat kabar	

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	2	3	4	5
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	Kasubag Umum dan Kepegawaian
V	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
1	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan perlengkapan kantor	3 jenis	
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan kantor	7 jenis	
VI	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	3 jenis	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang tersedia	2 jenis	
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga honorer/tenaga pengamanan/sopir yang menerima gaji/honor	26 orang	
VII	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah STNK yang terlunasi	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	21 unit PC, 11 laptop, 29 unit printer	
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 gedung kantor	
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah pengadaan barang cetakan dan penggandaan	10 cetakan, 18 jenis	
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 surat kabar	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	100%	

No.	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Ket
1	2	3	4	5
VIII Pengelolaan Pendapatan Daerah				
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pajak daerah yang tersusun	2 dokumen	Kasubbid Perencanaan dan Pengembangan
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah dokumen analisa potensi dan kebijakan pajak daerah yang tersusun	2 dokumen	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penyuluhan pajak daerah yang tersusun	3 laporan	
4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendataan Subyek/Obyek Pajak	900.000 Obyek Pajak	Kasubbid Pendataan dan Pendaftaran
5	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang telah dilakukan penilaian baik massal maupun individual	850.000 obyek pajak	Kasubbid Penetapan
6	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana prasarana pajak daerah yang tersedia	11 jenis pajak daerah	Sub Koordinator Pelayanan dan Konsultasi
7	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah jenis pelayanan yang tersedia	4 jenis layanan	
8	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil penagihan pajak daerah yang tersusun	4 laporan	Kasubbid Penagihan
9	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah berkas keberatan pajak daerah yang terselesaikan	50 berkas	Kasubbid Penyelesaian Keberatan dan Banding
10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan (LHP) pajak daerah yang tersusun	4 LHP	Sub Koordinator Pengawasan dan Pemeriksaan
11	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah laporan realisasi pajak pajak daerah yang tersusun	4 laporan	Kasubbid Pembukuan dan Pelaporan
12	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan pengawasan retribusi daerah yang tersusun	4 laporan	Kasubbid Evaluasi dan Pengendalian

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

1) Pencapaian Kinerja

Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan program sifatnya terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti pengukurannya. Pertanggungjawaban pengukuran yang diukur adalah kegiatan, program dan sasaran, yang prosesnya adalah sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran dilaksanakan tidak salah arah dengan berbagai piranti perencanaan yang telah dibuat.

Untuk mengukur rencana keberhasilan capaian kinerja digunakan instrument pengukuran ordinal berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2022, dengan memperhitungkan indikator masukan, keluaran, dan hasil. Skala pengukuran kinerja sebagai berikut:

85 – 100	=	Sangat baik/sangat berhasil ;
70 - < 85	=	Baik/berhasil ;
55 - < 70	=	Kurang baik/kurang berhasil ;
< 55	=	Sangat kurang baik/tidak berhasil.

Adapun pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan

Kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Berikut disajikan hasil Pengukuran Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022, yang diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan
Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI				Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	2,56%	2,64%	2,83%	2,92%	2,61%	2,61%	101,95%
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,51	86,42	86,84	-	-	-	-
Rata-rata									101,95%

Berdasarkan tabel 3.1. di atas, Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah rata-rata tercapai sebesar 101,95%. Untuk Sasaran Kinerja yang pertama yakni Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Persentase Peningkatan PAD terealisasi sebesar 2,61% dari target 2,56% atau tercapai sebesar 101,95%. Sedangkan untuk Sasaran Kinerja yang kedua dengan indikator Nilai Sakip Bapenda belum bisa dilakukan pengukuran, karena hingga laporan kinerja ini disusun Nilai Sakip Bapenda belum dirilis oleh Inspektorat.

41,31%, Pajak Air Tanah meningkat sebesar 8,72%, Pajak Sarang Burung meningkat sebesar 504,74% dan BPHTB meningkat sebesar 21,65%. Sedangkan 3 jenis pajak daerah lainnya mengalami penurunan, antara lain : Pajak Reklame menurun sebesar 13,66%, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurun sebesar 12,29% dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menurun sebesar 12,29%.

2) Retribusi Daerah

Sektor retribusi daerah terealisasi sebesar Rp. 23.542.842.847,89 atau sebesar 113,72% dari target Rp. 20.701.873.200,00. Realisasi ini meningkat sebesar 64,69% bila dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini disebabkan karena terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.4

Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2022

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	50.538.877,00	9.390.404.516,69	9.339.865.639,69	18.480,56
2.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	7.845.832.000,00	7.872.483.000,00	26.651.000,00	0,34
3.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.172.297.000,00	1.043.138.000,00	-129.159.000,00	-11,02
4.	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	65.740.000,00	65.280.000,00	-460.000,00	-0,70
5.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	106.960.800,00	112.359.200,00	5.398.400,00	5,05
6.	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	949.898.250,00	1.039.044.195,00	89.145.945,00	9,38

No.	Jenis Retribusi Daerah	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan	
				Rp.	%
7.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.396.554.147,00	1.523.694.405,00	127.140.258,00	9,10
8.	Retribusi Tempat Pelelangan	344.600.000,00	467.250.000,00	122.650.000,00	35,59
9.	Retribusi Terminal	27.043.000,00	27.121.000,00	78.000,00	0,29
10.	Retribusi Rumah Potong Hewan	178.975.000,00	200.050.000,00	21.075.000,00	11,78
11.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	621.857.000,00	1.345.992.000,00	724.135.000,00	116,45
12.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.026.709.000,00	519.026.531,20	-507.682.468,80	-49,45
13.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	508.266.200,00	-	-	-100%
	JUMLAH	14.295.271.274,00	23.605.842.847,89	9.310.571.573,89	65,13

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 13 retribusi daerah terdapat 9 jenis retribusi daerah mengalami peningkatan, antara lain : Retribusi Pelayanan Kesehatan meningkat sebesar 18.480,56%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum meningkat sebesar 0,34%, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang meningkat sebesar 5,06%, Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi meningkat sebesar 9,38% , Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah meningkat sebesar 9,10%, Retribusi Tempat Pelelangan meningkat sebesar 35,59%, Retribusi Terminal meningkat sebesar 0,29%, Retribusi Rumah Potong Hewan meningkat sebesar 11,78%, Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga meningkat sebesar 116,45%. Sedangkan 4 jenis retribusi daerah lainnya

mengalami penurunan antara lain : Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor menurun sebesar 11,02%, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran menurun sebesar 0,70%, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan menurun sebesar 49,45% dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) menurun sebesar 49,45%.

3) Hasil Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 17.199.695.333,86 atau sebesar 75,25% dari target Rp. 22.855.892.314,00. Realisasi ini menurun sebesar 10,31% bila dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.5
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Dividen dari PT. BANK JATIM	4.949.399.687,75	5.279.697.394,65	330.297.706,90	6,67
2.	Dividen dari PD Bank Daerah	3.984.895.848,30	3.438.372.106,21	-546.523.742,09	-13,71
3.	Dividen dari Lamongan Integreted Shorebase	464.293.610,00	899.329.833,00	435.036.223,00	93,70
4.	Dividen dari Aneka Usaha Lamongan Jaya	273.000.000,00	325.000.000,00	52.000.000,00	19,05
5.	Dividen dari PD Pasar Lamongan	804.647.777,00	1.007.296.000,00	202.648.223,00	25,18
6.	Dividen dari PT Wisata Bahari Lamongan	7.000.000.000,00	4.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-35,71
7.	Dividen dari PDAM	1.700.000.000,00	1.750.000.000,00	50.000.000,00	2,94
	JUMLAH	19.176.236.923,05	17.199.695.333,86	-1.976.541.589,19	-10,31

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 7 Dividen BUMD terdapat 5 dividen BUMD yang mengalami peningkatan, antara lain ; PT. Bank Jatim meningkat sebesar 6,67%, Lamongan Integreted Shorebase meningkat sebesar 93,70%, Aneka Usaha Lamongan Jaya meningkat sebesar 19,05%, PD Pasar Lamongan meningkat sebesar 25,18%, PDAM meningkat sebesar 2,94%. Sedangkan 2 dividen BUMD mengalami penurunan yakni : PD. Bank Daerah menurun sebesar 13,71%, dan PT. Wisata Bahari Lamongan menurun sebesar 35,71%

4) Lain-Lain PAD yang Sah

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan terealisasi sebesar Rp. 314.089.228.141,08 atau sebesar 94,60% dari target Rp. 332.086.771.810,00. Realisasi ini menurun sebesar 4,29% bila dibanding tahun sebelumnya, sebagaimana tabel di bawah.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari 10 jenis Lain-Lain PAD yang Sah, terdapat 7 jenis Lain-Lain PAD yang Sah mengalami peningkatan antara lain Jasa Giro meningkat sebesar 137,81%, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan meningkat sebesar 100%, Pendapatan Denda Pajak Daerah meningkat sebesar 206,47%, Pendapatan Denda Retribusi Daerah meningkat sebesar 831%, Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP meningkat sebesar 100% dan Pendapatan dan Pengembalian Lainnya meningkat sebesar 223,47%, sedangkan 3 jenis Lain-Lain PAD yang Sah lainnya mengalami penurunan yakni Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan menurun sebesar 67,36%, Hasil Kerja Sama Daerah menurun sebesar 53,86% dan Pendapatan BLUD menurun sebesar 5,78%.

Tabel 3.6
Lain-Lain PAD yang Sah
Tahun 2022

No.	Uraian	Realisasi Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Peningkatan	
				Rp.	%
1.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	193.736.200,00	63.242.500,00	-130.493.700,00	-67,36
2.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
3.	Hasil Kerja Sama Daerah	289.650.000,00	133.650.000,00	-156.000.000,00	-53,86
4.	Jasa Giro	697.872.682,30	1.659.644.695,48	961.772.013,18	137,81
5.	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	761.817.982,11	761.817.982,11	100
6.	Pendapatan Denda Pajak Daerah	23.004.230,00	70.499.995,00	47.495.765,00	206,47
7.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	9.600,00	89.376,00	79.776,00	831,00
8.	Pendapatan BLUD	325.562.406.129,60	306.737.481.324,06	18.824.924.805,54	-5,78
9.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	-	103.472.677,45	103.472.677,45	100
10.	Pendapatan dan Pengembalian Lainnya	1.409.493.869,62	4.559.329.590,98	3.149.835.721,36	223,47
	JUMLAH	328.176.172.711,52	314.089.228.141,08	-14.086.944.570,44	-4,29

II. Sasaran Strategis Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah

Sasaran Strategis yang kedua yakni Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah dengan Indikator Nilai Sakip Bapenda sampai dengan Laporan LKJIP ini disusun masih belum diliris oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan. Nilai Sakip yang sudah dirilis sebatas nilai Sakip pada Triwulan I dan Triwulan II masing-masing sebesar 86,42 dan 86,84, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7
 Nilai Sakip Bapenda Tahun 2022

INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2021	TARGET KINERJA 2022				REALISASI 2022					CAPAIAN 2022					
		TAHUN 2022	TW1	TW2	TW3	TW4	TW1	TW2	TW3	TW4	Akhir Tahun	TW1	TW2	TW3	TW4	Akhir Tahun
Nilai SAKIP Bapenda	88,25	87,51	86,34	86,72	87,11	87,51	86,42	86,84	-	-	-	100,09%	100,14%	-	-	-

2) Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
 Perbandingan Realisasi Kinerja
 Tahun 2022 dengan Tahun Sebelumnya

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2021			TAHUN 2022			SELISIH
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	2,95%	2,97%	100,68%	2,56%	2,61%	101,95%	1,28%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Bapenda	87,47	88,25	100,89%	87,51	-	-	
	Rata-rata				100,78%			101,95%	1,17%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa rata-rata realisasi kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya terdapat peningkatan yakni sebesar 1,17%. Indikator Kinerja Persentase Peningkatan PAD pada tahun 2021

tercapai sebesar 100,68% sedangkan tahun 2022 tercapai sebesar 101,95% atau meningkat sebesar 1,28%, Sedangkan untuk indikator Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah sementara masih belum bisa diukur karena Nilai Sakip Bapenda pada Tribulan IV Tahun 2022 masih belum dirilis oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan. .

3) Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Akhir Periode RPJMD/Renstra.

Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target sampai dengan akhir periode RPJMD/Renstra bisa dilihat pada tabel berikut berikut :

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022
Dengan Target Kinerja Akhir Periode RPJMD/Renstra

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TAHUN 2022		Target Akhir Periode RPJMD	Tingkat Kemajuan
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	7	10
1	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	2,56%	2,61%	2,60%	100,38%
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Bapenda	87,51	-	87,55	-
	Rata-rata					100,38%

Dari tabel tersebut terlihat bahwa realisasi kinerja tahun 2022 bila dibandingkan dengan target akhir periode RPJMD/Renstra bisa dikatakan berhasil dengan rata-rata tingkat kemajuan 100,38%. Indikator kinerja Persentase

Peningkatan PAD terdapat tingkat kemajuan sebesar 100,38%, namun untuk Indikator Nilai Sakip Bapenda untuk sementara belum bisa diukur tingkat kemajuannya karena masih belum dirilis oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan

4) Analisis Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan

Beberapa hal yang mempengaruhi pencapaian indikator sasaran dan keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2022 sebagaimana tersebut di atas antara lain:

1. Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kompetensi pegawai yang terus menerus ditingkatkan;
3. Penerapan teknologi informasi dalam menunjang setiap aktivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan;
4. Adanya regulasi yang jelas terkait pendapatan daerah;
5. Semakin meningkatnya tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

5) Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (*cost per outcome*).

Tujuan dari *Cost per Outcome* adalah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja, yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk

mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Perhitungan analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya untuk pencapaian sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3.10
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Kineja	Realisasi Anggaran	Efisiensi
Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	101,95%	92,21%	9,74%
Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Bapenda	-	93,78%	
Rata-rata		101,95%	93,00%	8,96%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat efisiensi sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 8,96%, untuk Indikator meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat efisiensi sebesar 9,74%, sedangkan untuk indikator Nilai Sakip Bapenda tingkat effiensiya masih belum bisa diukur karena Nilai Sakip Bapenda masih belum dirilis oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja

Terdapat 2 program, 8 kegiatan dan 34 Sub kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja. Pada tabel 3.10 dan tabel 3.11 menyajikan capaian kinerja program dan kinerja kegiatan tahun 2022.

Tabel 3.11
Capaian Kinerja Program
Tahun 2022

No.	Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	IKM Internal Bapenda	83,24	85,39	102,58%	13.003.974.348	12.195.714.210	93,78%
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,51%	0,93%	182,61%	6.198.148.000	5.715.034.831	92,21%
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,26%	3,83%	117,39%			
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD Lainnya	1,86%	2,07%	111,52%			
		Rata-Rata						
Rata-Rata Kinerja					128,53%	93,00%		

Dari tabel capaian kinerja program di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja program adalah sebesar 128,53%, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota tercapai sebesar 102,58% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai sebesar 137,171%. Adapun realisasi anggaran rata-rata tercapai sebesar 88,08%. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tercapai sebesar 93,78% dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah tercapai sebesar 92,21%.

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Kegiatan
Tahun 2022

No.	KEGIATAN	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen	100,00%	99.819.000,00	99.668.480,00	99,85%
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan	100,00%	11.282.251.948,00	10.546.997.010,00	93,48%
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	175.820.000,00	172.564.000,00	98,15%
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100,00%	119.716.700,00	117.591.650,00	98,22%
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 jenis	6 jenis	100,00%	78.449.300,00	77.520.100,00	98,82%
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100,00%	1.028.148.400,00	970.871.270,00	94,43%
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83 unit	83 unit	100,00%	219.769.000,00	210.501.700,00	95,78%
8	Pengelolaan Pendapatan Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	6.198.148.000,00	5.715.034.831,00	92,21%
		15 jenis	15 jenis				
		8 laporan	8 laporan				
Rata-rata				100,00%			96,37%

Dari tabel di atas terlihat bahwa rata-rata capaian kinerja kegiatan tercapai sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,37%, sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 3,63%. Selanjutnya untuk capaian kinerja sub kegiatan sebagaimana tabel di bawah, dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 87,87%, sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 12,13%.

Tabel 3.13
Capaian Kinerja Sub Kegiatan
Tahun 2022

No.	SUB KEGIATAN	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	39.819.000	39.781.700	99,91%
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	100,00%	60.000.000	59.886.780	99,81%
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	43 orang	43 orang	100,00%	11.222.251.948	10.487.141.010	93,45%
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan	100,00%	30.000.000	29.953.000	99,84%
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 laporan	3 laporan	100,00%	30.000.000	29.903.000	99,68%
6	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	60 Pcs	60 Pcs	100,00%	50.000.000	49.864.000	99,73%
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100 peserta	100 peserta	100,00%	125.820.000	122.700.000	97,52%
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	15 jenis	15 jenis	100,00%	10.000.000	9.982.800	99,83%
9	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 jenis		100,00%	216.700		0,00%
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35 jenis	35 jenis	100,00%	35.000.000	34.973.300	99,92%
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	14 cetakan, 4 jenis	14 cetakan, 4 jenis	100,00%	35.000.000	34.699.850	99,14%
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 surat kabar	12 surat kabar	100,00%	13.000.000	12.780.000	98,31%
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	100%	100,00%	26.500.000	25.155.700	94,93%
14	Pengadaan Mebel	1 jenis	1 jenis	100,00%	7.178.300	6.870.100	95,71%
15	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2 jenis	2 jenis	100,00%	71.271.000	70.650.000	99,13%
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	3 jenis	3 jenis	100,00%	411.286.400	405.052.000	98,48%
17	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2 jenis	2 jenis	100,00%	11.994.000	11.952.050	99,65%
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	26 orang	26 orang	100,00%	604.868.000	553.867.220	91,57%
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	100,00%	15.000.000	6.183.700	41,22%

No.	SUB KEGIATAN	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	5 mobil dinas, 19 sepeda motor	100,00%	168.069.000	167.983.000	99,95%
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	21 unit PC, 11 laptop, 29 unit printer	21 unit PC, 11 laptop, 29 unit printer	100,00%	36.400.000	36.335.000	99,82%
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 gedung kantor	1 gedung kantor	100,00%	300.000		0,00%
23	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	16.000.000	15.600.000	97,50%
24	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	2 dokumen	2 dokumen	100,00%	25.000.000	24.784.080	99,14%
25	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 laporan	3 laporan	100,00%	72.022.000	41.318.500	57,37%
26	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	11 jenis pajak daerah	11 jenis pajak daerah	100,00%	70.000.000	68.694.000	98,13%
27	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	50.000 obyek pajak	50.000 obyek pajak	100,00%	1.375.000.000	1.373.676.000	99,90%
28	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	850.000 obyek pajak	850.000 obyek pajak	100,00%	540.000.000	537.136.200	99,47%
29	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	4 jenis pelayanan	4 jenis pelayanan	100,00%	152.022.000	109.182.000	71,82%
30	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	53.644.000	53.282.400	99,33%
31	Penagihan Pajak Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	3.481.400.000	3.119.550.851	89,61%
32	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	50 berkas	50 berkas	100,00%	20.000.000	20.000.000	100,00%
33	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	4 LHP	4 LHP	100,00%	127.060.000	86.361.800	67,97%
34	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 laporan	4 laporan	100,00%	266.000.000	265.449.000	99,79%
Rata-rata				100,00%			87,87%

B. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar sebesar Rp. 17.910.749.041,00 atau mencapai 93,27% dari total pagu Rp. 19.202.122.348,00 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.14
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun 2022

URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	13.003.974.348,00	12.195.714.210,00	93,78
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	99.819.000,00	99.668.480,00	99,85
Penyuluhan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	39.819.000,00	39.781.700,00	99,91
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	60.000.000,00	59.886.780,00	99,81
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.282.251.948,00	10.546.997.010,00	93,48
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11.222.251.948,00	10.487.141.010,00	93,45
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	30.000.000,00	29.953.000,00	99,84
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30.000.000,00	29.903.000,00	99,68
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	175.820.000,00	172.564.000,00	0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	50.000.000,00	49.864.000,00	99,73
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	125.820.000,00	122.700.000,00	97,52
Administrasi Umum Perangkat Daerah	119.716.700,00	117.591.650,00	98,22
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.982.800,00	99,83
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	216.700,00		0,00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	35.000.000,00	34.973.300,00	99,92
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	35.000.000,00	34.699.850,00	99,14
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	13.000.000,00	12.780.000,00	98,31
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	26.500.000,00	25.155.700,00	94,93
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	78.449.300,00	77.520.100,00	98,82
Pengadaan Mebel	7.178.300,00	6.870.100,00	95,71
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	71.271.000,00	70.650.000,00	99,13
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.028.148.400,00	970.871.270,00	94,43
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	411.286.400,00	405.052.000,00	98,48
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.994.000,00	11.952.050,00	99,65
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	604.868.000,00	553.867.220,00	91,57
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	219.769.000,00	210.501.700,00	95,78
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15.000.000,00	6.183.700,00	41,22
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	168.069.000,00	167.983.000,00	99,95
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.400.000,00	36.335.000,00	99,82
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	300.000,00		0,00

URAIAN	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	6.198.148.000,00	5.715.034.831,00	92,21
Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.198.148.000,00	5.715.034.831,00	92,21
Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	16.000.000,00	15.600.000,00	97,50
Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	25.000.000,00	24.784.080,00	99,14
Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	72.022.000,00	41.318.500,00	57,37
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	70.000.000,00	68.694.000,00	98,13
Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	1.375.000.000,00	1.373.676.000,00	99,90
Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	540.000.000,00	537.136.200,00	99,47
Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	152.022.000,00	109.182.000,00	71,82
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	53.644.000,00	53.282.400,00	99,33
Penagihan Pajak Daerah	3.481.400.000,00	3.119.550.851,00	89,61
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00
Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	127.060.000,00	86.361.800,00	67,97
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	266.000.000,00	265.449.000,00	99,79
JUMLAH	19.202.122.348,00	17.910.749.041,00	93,27

Adapun rincian penggunaan anggaran yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah bisa dijelaskan sebagai berikut:

1. Program penunjang urusan pemerintah kabupaten/kota, yang dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 39.819.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen-dokumen perencanaan. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,91% dan fisik sebesar 100%.

2) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran sebesar Rp. 60.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen evaluasi kinerja. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,81% dan fisik sebesar 100%.

b. Administrasi Keuangan Daerah, dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.222.251.948,00, yang dipergunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN Bapenda. Adapun realisasi keuangan sebesar 76,08% dan fisik sebesar 100%;

2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan keuangan akhir tahun. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,84% dan fisik sebesar 100%;

3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen laporan keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,68% dan fisik sebesar 100%.

c. Administrasi Kepegawaian

1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00, yang dipergunakan untuk

pengadaan pakaian dinas ASN beserta perlengkapannya. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,73% dan fisik sebesar 100%.

- 2) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 125.820.000,00, yang dipergunakan untuk pelaksanaan diklat ASN. Adapun realisasi keuangan sebesar 97,52% dan fisik sebesar 100%.

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,83% dan fisik sebesar 100%;
- 2) Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00, yang dipergunakan untuk penyediaan alat tulis kantor. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,92% dan fisik sebesar 100%;
- 3) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 35.000.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan barang cetak/penggandaan (14 cetakan), Adapun realisasi keuangan sebesar 99,14% dan fisik sebesar 100%;
- 4) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.000.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan bahan bacaan (12 surat kabar), Adapun realisasi keuangan sebesar 98,31% dan fisik sebesar 100%.

e. Pengadaan Barang Milik Daerah dengan sub kegiatan:

1) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 26.500.000,00 yang dipergunakan untuk pembelian 2 (dua) unit AC, Adapun realisasi keuangan sebesar 94,93% dan fisik sebesar 100%.

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 411.286.400,00 yang dipergunakan untuk pembayaran rekening listrik dan internet, Adapun realisasi keuangan sebesar 98,48% dan fisik sebesar 100%;

2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 11.994.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan rumah tangga. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,65% dan fisik sebesar 100%;

3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 604.868.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran gaji tenaga honorer sebanyak 26 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar 91,57% dan fisik sebesar 100%.

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.000.000,00 yang dipergunakan untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (20 sepeda motor dan 5 mobil). Adapun realisasi keuangan sebesar 41,22% dan fisik sebesar 100%;
 - 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 168.069.000,00 yang dipergunakan untuk service kendaraan bermotor dan pembelian BBM (20 sepeda motor dan 5 mobil). Adapun realisasi keuangan sebesar 99,95% dan fisik sebesar 100%;
 - 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 36.400.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan peralatan kantor (20 unit PC, 28 unit printer, dan 10 laptop). Adapun realisasi keuangan sebesar 99,82% dan fisik sebesar 100%;
- h. Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan sub kegiatan:
- 1) Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 16.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan (2 dokumen). Adapun realisasi keuangan sebesar 97,50% dan fisik sebesar 100%;
 - 2) Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah, yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen SOP (2 SOP). Adapun realisasi keuangan sebesar 97,50% dan fisik sebesar 100%;

- 3) Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.022.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan penyuluhan pajak daerah (3 laporan). Adapun realisasi keuangan sebesar 57,37% dan fisik sebesar 100%;
- 4) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 70.000.000,00 yang dipergunakan untuk pengadaan blanko SSPD BPHTB sebanyak 600 buku. Adapun realisasi keuangan sebesar 98,13% dan fisik sebesar 100%;
- 5) Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.375.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen Zona Nilai Tanah di Kabupaten Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,90% dan fisik sebesar 100%;
- 6) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 540.000.000,00 yang dipergunakan untuk pencetakan SPPT dan DHKP PBB. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,47% dan fisik sebesar 100%;
- 7) Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 152.022.000,00 yang dipergunakan untuk pemeliharaan aplikasi pendapatan online. Adapun realisasi keuangan sebesar 71,82% dan fisik sebesar 100%;
- 8) Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 53.644.000,00 yang dipergunakan untuk

penyusunan laporan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,33% dan fisik sebesar 100%;

9) Penagihan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.481.400.000,00 yang dipergunakan untuk penyisiran PBB di Desa-Desa se Kab. Lamongan. Adapun realisasi keuangan sebesar 89,61% dan fisik sebesar 100%;

10) Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 20.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan penyelesaian keberatan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan dan fisik sebesar 100%;;

11) Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 127.060.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan laporan pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah. Adapun realisasi keuangan sebesar 67,97% dan fisik sebesar 100%;

12) Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 266.000.000,00 yang dipergunakan untuk penyusunan dokumen pembinaan dan pengawasan retribusi daerah serta pembayaran gaji petugas cheker sebanyak 18 orang. Adapun realisasi keuangan sebesar 99,79% dan fisik sebesar 100%.

BAB IV
PENUTUP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja, baik makro maupun mikro dibidang pendapatan daerah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam melaksanakan berbagai kewajiban pembangunannya.

Hasil Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sasaran Kinerja Badan Pendapatan Daerah rata-rata tercapai sebesar 101,95%. Untuk Sasaran Kinerja yang pertama yakni Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Persentase Peningkatan PAD terealisasi sebesar 2,61% dari target 2,56% atau tercapai sebesar 101,95%. Sedangkan untuk Sasaran Kinerja yang kedua dengan indikator Nilai Sakip Bapenda belum bisa dilakukan pengukuran, karena hingga laporan kinerja ini disusun Nilai Sakip Bapenda belum dirilis oleh Inspektorat.
2. Tingkat efisiensi sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 8,96%, untuk Indikator meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdapat efisiensi sebesar 9,74%, sedangkan untuk indikator Nilai Sakip Bapenda tingkat

efiensiya masih belum bisa diukur karena Nilai Sakip Bapenda masih belum dirilis oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan.

3. Capaian kinerja kegiatan tercapai sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 96,37% sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 3,63%. Sedangkan untuk capaian kinerja sub kegiatan tercapai sebesar 100% dan realisasi anggaran sebesar 87,87% sehingga terdapat tingkat efisiensi sebesar 12,13%.

B. Saran

Beberapa langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam upaya untuk meningkatkan kinerja ke depan antara lain :

- a. Meningkatkan sosialisasi secara intens baik melalui media cetak maupun elektronik;
- b. Meningkatkan kualitas SDM Badan Pendapatan Daerah melalui Pelatihan/Bimbingan Teknis yang terkait pajak daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran data (*updating data*) obyek/subyek pajak daerah.
- d. Meningkatkan efektivitas penagihan dan pemeriksaan pajak daerah.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.
- f. Melakukan pendataan ulang wajib pajak dan penggalian potensi-potensi baru.

Sebagai bagian penutup, Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Dengan disusunnya laporan ini, diharapkan pula dapat menjadi bahan evaluasi bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan dalam meningkatkan capaian kinerja pada masa yang akan datang.

LAMPIRAN

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **A.FARIKH ,SH, M.M**
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DR.YUHRONUR EFENDI, MBA**
Jabatan : Bupati Lamongan
selaku atasan langsung dari **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lamongan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DR.YUHRONUR EFENDI, MBA

A.FARIKH ,SH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2,56 %
		Persentase Peningkatan Jumlah Wajib Pajak	0,51 %
		Persentase Peningkatan Pajak Daerah	3,26 %
		Persentase Peningkatan Retribusi Daerah dan PAD lainnya	1,86 %
2	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	87,51
		Nilai IKM Internal BAPENDA	83,24

PPROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.003.974.348	APBD
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.198.148.000	APBD

Lamongan, 12 Oktober 2022

PIHAK KEDUA
BUPATI LAMONGAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN

DR.YUHRONUR EFENDI, MBA

A.FARIKH, SH, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19670516 199602 1 003

**CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2022**

NO.	SASARAN	INDIKATOR	TARGET	REALISASI				Realisasi Tahun 2022	Capaian Kinerja
				TW I	TW II	TW III	TW IV		
1.	Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan PAD	2,56%	2,64%	2,83%	2,92%	2,61%	2,61%	101,95%
2.	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bapenda	87,51	86,42	86,84	-	-	-	-
Rata-rata									101,95%

